



HISTORISME PEREMPUAN DALAM SEJARAH: FORMULA KESETARAAN GENDER DI INDONESIA UNTUK MENYONGSONG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Triana Wahyuni

Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Semarang

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Juni 2020

Disetujui Juli 2020

Dipublikasikan Juli 2020

Keywords:

Historicism, Feminism,

Gender Equality,

Sustainable Development

Goals

Abstrak

Kesetaraan gender sebenarnya telah jauh diperjuangkan baik pada masa kuno maupun masa modern. Hanya saja kesadaran sejarah semacam ini masih sangat rendah, sehingga kesetaraan gender di Indonesia belum dapat terwujud secara keseluruhan. Kondisi inilah yang kemudian melatarbelakangi adanya kajian mengenai konsep sejarah perempuan dalam upaya peningkatan kesetaraan gender khususnya dalam rangka menyongsong pembangunan berkelanjutan (SDG's). Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan hermeneutika dan teknik pengumpulan data berupa analisis. Melalui strategi dan konsep historisme harapannya ideologi feminism akan semakin tertanam dalam diri perempuan Indonesia. Pencapaian kesadaran sejarah feminism akan berdampak pada pemberdayaan perempuan dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Tidak hanya selesai dalam pengembangan konsep filsafat, historisme juga menjadi sebuah aksi nyata dalam perwujudan kesetaraan gender di Indonesia yakni diwujudkan dengan *History*, Siklus Pelaku Program Pembangunan, dan Upaya Mengatasi Kebutuhan Gender secara Praktis dan Strategis. Aksi Historisme ini tentunya melibatkan semua pihak baik pemerintah, akademisi, maupun masyarakat. Harapannya dengan aksi historisme yang dilakukan oleh semua elemen, akan tercipta kesetaraan sejati di mana bukan hanya persoalan 'perempuan dan laki-laki' namun pada capaian pemberdayaan semua lapisan masyarakat termasuk kaum marginal dalam keterlibatan pembangunan nasional. Dengan tercapainya kesetaraan sejati inilah Indonesia mampu mencapai pembangunan dan kesejahteraan berkelanjutan.

Abstract

Gender equality has actually been fought for both ancient and modern times. It's just that historical awareness of this kind is still very low, so that gender equality in Indonesia has not been able to be realized as a whole. This condition then becomes the background for the study of the concept of women's history in an effort to increase gender equality, especially in the context of welcoming Sustainable Development Goals (SDG's). The method used in this research is descriptive qualitative with a hermeneutic approach and data collection techniques in the form of analysis. Through the strategies and concepts of historicism, it is hoped that the ideology of feminism will be increasingly embedded in Indonesian women. Achieving historical awareness of feminism will have an impact on women's empowerment in sustainable development activities in Indonesia. Not only completed in the development of philosophical concepts, historicism has also become a real action in the realization of gender equality in Indonesia, namely manifested by History, Cycles of Development Program Actors, and Efforts to Address Gender Needs Practically and Strategically. This historical action certainly involves all parties, including government, academia, and society. The hope is that with historicism actions carried out by all elements, true equality will be created where it is not only a matter of "women and men" but also the achievement of empowerment of all levels of society including marginalized groups in the involvement of national development. By achieving true equality, Indonesia is able to achieve sustainable development and prosperity.

© 2020 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Ruang Jurnal Sejarah, Gedung C5 Lantai 1 FIS Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: trianawahyuni@students.unnes.ac.id

ISSN 2252-6633

PENDAHULUAN

Fakta Indonesia yang dikabarkan akan mengalami ledakan penduduk usia produktif di tahun 2030 adalah kesempatan emas bagi Indonesia. Hal inilah yang disebut dengan bonus demografi, di mana terdapat penurunan angka kematian dan angka kelahiran serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan memanfaatkan usia produktif secara optimal (Mukri, 2018: 51). Periode bonus demografi Indonesia telah dimulai pada tahun 2015 dan diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 2030, dengan angka ketergantungan 0,4-0,5 yang mana setiap 100 orang produktif menanggung 40-50 orang non-produktif (Falikhah, 2017). Angka tersebut menjadi efektif apabila dapat terlaksana dan menjadi peluang Indonesia untuk mencapai kesejahteraan.

Keadaan inilah yang kemudian menjadi prioritas utama pemerintah saat ini, khususnya untuk mempersiapkan bonus demografi sebagai upaya pembangunan Indonesia yang berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals*. Pada prinsipnya SDG's dirancang secara partisipatif dengan melibatkan seluruh subjek pembangunan baik pemerintah, swasta, organisasi, akademisi, dan masyarakat luas. Dengan keterlibatan semua pihak, harapannya SDG's mampu mencapai keadilan seutuhnya, yakni konsep keadilan secara prosedural atau keadilan bagi seluruh pihak tertinggal sehingga dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan; dan konsep keadilan substansial atau keadilan tentang kebijakan program pembangunan untuk menjawab persoalan kelompok yang tertinggal. Dalam upaya menyongsong SDG's, terdapat 17 tujuan pembangunan dan 169 rencana aksi global. Salah satu di antara 17 tujuan pembangunan dalam SDG's yakni program kesetaraan gender.

Diskriminasi gender di Indonesia masih tergolong tinggi. Hal ini dibuktikan dengan adanya data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2018 yang menyatakan bahwa TPAK perempuan lebih rendah daripada laki-laki yakni 51,88 % berbanding dengan 82,69%.

Walaupun di sisi lain, kedudukan perempuan dalam dunia pendidikan era modern ini tidak seburuk yang dibayangkan. Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa lulusan pendidikan formal untuk perempuan dan laki-laki menunjukkan data seimbang yakni 50,88% dan 49,22% (BPS, 2019: 44-45). Kondisi ini tentu berbeda dengan peran perempuan di masa kerajaan, atau masa kolonial, atau bahkan masa kependudukan Jepang, yang memandang perempuan hanya sebatas urusan *dapur, sumur, dan kasur*. Hanya saja kenyataan dalam dunia ketenagakerjaan, perempuan masih kurang leluasa untuk mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Bappenas, perempuan memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan perekonomian negara. Apabila TPAK perempuan ditingkatkan menjadi 64% maka terdapat 20 juta angkatan kerja semi-skilled dan skilled baru. Oleh karenanya salah satu program SDG's yang perlu diterapkan sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan yakni menaikkan TPAK perempuan serta keleluasaannya memperoleh kesempatan kerja tanpa membedakan gender.

Berkaca pada sejarahnya, konsep kesetaraan gender sebenarnya telah diperjuangkan jauh sebelum isu ini kembali hadir. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya tokoh-tokoh perempuan dalam perjuangan bangsa Indonesia, salah satunya yakni Kartini. Kartini merupakan salah satu pejuang emansipasi perempuan pada masa kolonial. Hukum kolonial dan konsep feudalisme dalam pemerintahan Jawa saat itu, membuat Kartini memiliki cita-cita untuk berjuang mengangkat derajat perempuan pribumi agar mendapat hak yang setara dengan kaum laki-laki. Bahkan hingga kini tanggal kelahirannya dijadikan sebagai Hari Kartini, yang menyimbolkan adanya kebangkitan perempuan Indonesia.

Lantas apakah dengan diperingatinya Hari Kartini telah mengubah konsep kemandirian dan kesetaraan pada perempuan? Apakah hanya Kartini yang berjuang dalam perjuangan kesetaraan? Dari pertanyaan tersebut mengandung artian bahwa kesalahpahaman sejarah dan kegagalan akan kesadaran sejarah

juga menjadi bagian penting untuk menjadi bahan renungan. Kondisi sejarah yang dapat menjadi kaca bengala kehidupan serta mampu meramalkan kejadian yang akan datang tentu memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia, walaupun pada akhirnya manusia tetap menjadi penentunya. Kurangnya kesadaran akan sejarah ini juga mempengaruhi kondisi ideologi perempuan Indonesia (saat ini kerap disebut *feminisme*), di mana dengan kesadaran sejarah yang rendah maka ideologi perempuan tidak dapat ditanamkan secara eksklusif dan terstruktur. Masih rendahnya kesadaran akan sejarah dan ideologi perempuan inilah yang membuat perempuan Indonesia kurang memiliki akses bergerak khususnya dalam peningkatan kariernya sebagai penunjang pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goal's*. Kondisi inilah yang kemudian melatarbelakangi adanya kajian mengenai konsep historisme sejarah perempuan sebagai upaya peningkatan kesetaraan gender khususnya dalam rangka menyongsong pembangunan berkelanjutan (SDG's).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang mana penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami kejadian yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Creswell, 2010: 20). Strategi yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah menggunakan pendekatan hermeneutika. Pendekatan hermeneutika dalam karya tulis ini mencangkup pemahaman mendalam mengenai kajian teks dan interpretasi dari persoalan yang diajukan sebagai bentuk rumusan masalah.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh literatur

kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Beberapa di antaranya yakni buku, jurnal, internet, dan sumber sekunder lainnya. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis untuk kemudian direduksi menjadi deskriptif analisis dalam upayanya menjawab rumusan masalah.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Creswell, 2010: 308). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam karya tulis ini yakni studi dokumen dan observasi. Informasi yang didapatkan dari studi dokumen dijadikan sebagai landasan pikir untuk kemudian dianalisis. Sedangkan observasi yang dilakukan, digunakan untuk melihat kondisi realitas sehingga kemudian fakta-fakta yang ditemukan masuk dalam proses penggabungan dan analisis untuk mencapai hasil yang dicapai.

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, kemudian diurutkan dan diseleksi. Seluruh data tersebut kemudian diverifikasi dengan cara membandingkannya dengan data-data lain yang ada. Proses ini jelas berguna untuk menguji kebenaran dan memunculkan fakta baru yang dilakukan dalam tahapan interpretasi dan kemudian dituliskan dalam bentuk karya tulis ilmiah.

Kesadaran bahwa kesetaraan gender perlu dimunculkan dalam wacana pembangunan berkelanjutan tentu menjadi sebuah isu yang menarik. Banyak wacana-wacana feminism mulai dikembangkan. Kemunculan ideologi feminism tentu menjadi bagian dari obyek kajian sejarah.

Namun sayangnya, kesadaran sejarah di Indonesia masih sangat rendah, sehingga faktor ini kerap memicu tumbuhnya masalah-masalah yang memiliki pola dan kesinambungan yang besar. Untuk memutus kesalahan dan kegagalan kesadaran sejarah maka diperlukan konsep historisme yang kemudian diwujudkan menjadi upaya-upaya dalam rangka peningkatan kesetaraan gender di Indonesia pendukung program SDG's.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perempuan dalam Alur Sejarah di Indonesia

Isu gender memang selalu menarik perhatian banyak orang. Tidak hanya Indonesia yang memiliki masalah diskriminasi gender, namun banyak dari negara-negara di dunia juga mengalaminya. Bahkan negara sekelas Inggris dan Jerman pun mengalami diskriminasi gender sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Namun keberadaan feminism yang muncul dari dunia Barat memiliki sensitivitas yang tinggi, mengingat adanya sejarah kelam terhadap bangsa Indonesia. Lalu apakah Indonesia tidak memiliki sejarah feminism? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang kemudian muncul akibat gagalnya kesadaran akan sejarah Indonesia. Untuk itu, perlu adanya kajian mengenai peran perempuan dalam alur sejarah di Indonesia.

Pergerakan feminism di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak masa kuna. Hal ini dibuktikan dengan munculnya tokoh kejayaan nusantara seperti Ratu Sima, Sanggramavijaya, Dharma Prasada Tungga Dewi, Ken Dedes, Kusumawardhani, dan nama-nama lainnya. Banyaknya tokoh pemimpin perempuan pada masa kuna, tentu memberikan penjelasan bahwa pengucilan kaum perempuan adalah paradigma yang salah. Keteladanan Ratu Sima dengan membawa kendali politik di bawah seorang perempuan tidak selamanya membawa

kemunduran dan kegagalan, akan tetapi menjadi sebuah pembuktian bahwa perempuan memiliki kompetensi yang setara dan tidak melulu berbicara soal rumah tangga. Kuasa seorang perempuan juga tidak hanya ditunjukkan oleh orang-orang besar seperti tokoh di atas, namun juga diperankan oleh perempuan dari kalangan rakyat biasa yang dalam hal ini sangat menunjang perekonomian negara. Kiprah perempuan biasa ditunjukkan dengan adanya kegiatan penggarapan sawah, membuat kerajinan, membuat gula dan minyak, serta barang-barang lainnya untuk keperluan jual beli di samping tugas utamanya mengurus rumah tangga (Saraswati, 2016: 105-113).

Hampir sama seperti perempuan di masa kuna, gambaran peran perempuan pada awal masa modern masih sangat kaku dan mati. Kehidupan perempuan selalu diliputi tradisi-tradisi yang masih sangat terbelakang seperti halnya mengurus dan mengatur rumah tangga, serta mendidik dan mengasuh anak-anaknya. Hak-hak hidupnya sangat dibatasi, bahkan perempuan sering diibaratkan sebagai orang yang hanya mengetahui kehidupan *dapur, sumur, dan kasur*. Perbedaan masa modern kolonial dengan masa kuna terletak pada perkembangan teknologi yang semakin pesat, sehingga pendidikan menjadi peranan penting dalam kehidupan. Hak perempuan tentu berbeda dengan laki-laki yang dalam kehidupannya tidak pernah dibatasi baik kebebasan di luar rumah, bersekolah menduduki jabatan dalam masyarakat, serta semua kebebasan yang tidak dimiliki oleh kaum perempuan. Kondisi inilah yang kemudian melatarbelakangi awal perjuangan feminism di Indonesia masa modern.

Pionir perjuangan kesetaraan gender di awal masa modern tidak terlepas dari kiprah R.A. Kartini. Kartini merupakan anak kedua dari Bupati Jepara yang kemudian pindah ke Rembang karena pernikahannya dengan Raden Joyodiningrat. Kondisi Kartini yang pernah mengenyam pendidikan pada saat kecil menjadikan Kartini memiliki cita-cita perjuangan jauh ke depan khususnya dalam menyetarakan hak-hak perempuan. Beberapa ide gagasan Kartini yakni a) pendidikan bagi perempuan

adalah syarat paling penting dalam kehidupan; b) perempuan harus diberi kesempatan untuk menentukan pekerjaan yang cocok untuk mereka, dan c) penghapusan poligami karena merendahkan martabat perempuan (Amar, 2017: 111). Gagasan yang sangat berpotensi meningkatkan kesejahteraan perempuan tentu tidak dapat terpenuhi dengan mudah. Indonesia yang berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial tentu tidak dapat leluasa mendapat hak pendidikan yang memadai. Usaha Kartini tentu tidak hanya diam, sebagai salah satu responsnya Kartini kemudian mendirikan Sekolah Gadis (1912), dengan mata pelajaran di dalamnya yakni menulis, membaca, menjahit, merenda, memasak, dan peningkatan kemampuan lainnya.

Perjuangan feminism di era yang sama juga ditunjukkan oleh Rohana Kudus. Rohana merupakan wartawan perempuan dari Sumatera Barat yang mengasuh surat kabar *Soenting Melayu* pada tahun 1912. Berbeda dengan Kartini yang dilahirkan dalam lingkungan priyayi dan mendapatkan pendidikan di usia dini, Rohana tidak mendapatkan pengalaman yang sama namun keyakinan akan perlunya kesetaraan sangat kuat. Untuk mewujudkan cita-citanya, Rohaya mendirikan Sekolah Kerajinan Amal Setya (1911) untuk pemberdayaan perempuan secara ekonomi (Arivia dan Subono, th). Bukan hanya Kartini dan Rohana, masih banyak tokoh feminism yang lupa akan sorotan publik seperti Dewi Sartika, Martha Christina Tiahahu, Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Emmy Saelan, dan lain sebagainya. Perjuangan feminism masa modern juga semakin menunjukkan pergerakan yang signifikan walaupun sempat terkendala oleh politik masa Orde Baru. Obyek kajian sejarah yang semacam ini tentunya perlu dikaji secara mendalam sebagai bentuk dari peningkatan kesadaran sejarah feminism.

B. Formula Historisme dan Upaya Peningkatan Kesetaraan Gender

Historisme merupakan salah satu kajian filsafat sejarah. Hegel mengungkapkan bahwa kajian historisme memiliki 4 pokok bahasan, yakni 1) Kehidupan alam semesta telah diatur segala sesuatunya oleh sebuah hukum alam, yang

oleh Hegel disebut dengan *reasons* (Purwanta, 2011: 40-42). Tugas *reasons* inilah yang bertanggungjawab untuk mengatur segala sesuatu agar tercipta keamanan dan keharmonisan hidup; 2) Pelaku sejarah (manusia) yang masuk dalam bagian dari semesta, juga tunduk terhadap hukum alam atau *reasons*; 3) Korelasi variabel kehidupan baik adaptasi unsur pengatur dengan kondisi lokal. Hal inilah yang kemudian melibatkan ilmu sejarah untuk menganalisis dan menemukan unsur pengatur tersebut; 4) Sejarah merupakan ilmu yang linier dalam mencari korelasi antara masa lalu dengan masa yang akan datang. Atau dengan kata lain, konsep historisme yang dikemukakan oleh Hegel mengandung artian bahwa sejarah merupakan ilmu yang mampu mempelajari dinamika kehidupan manusia saat ini dan memprediksi masa depan dengan presisi yang tinggi.

Konsep historisme yang dikemukakan oleh Hegel kemudian mendapat bantahan dari Karl R. Propper. Propper berpendapat bahwa historisme Hegel sangat memaksakan kehendaknya, sehingga Propper menuntut adanya keterbukaan yakni kesediaan untuk saling mengisi dalam hal kebenaran (*the attitude of reasonableness*) (Ujan, 2015: 43). Tahun 1980-an konsep ini kembali hadir dengan nama neo historisme. Konsep ini lahir dilatar belakangi oleh problematika yang muncul pasca Perang Dunia II dengan tujuan untuk pemecahan masalah sosial aktual dengan metode tafsir dari karya sastra. Nurul Laili (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa historisme adalah suatu pendekatan dalam menganalisis karya sastra yang di dalamnya memuat refleksi karya tersebut sesuai dengan periode zaman karya diterbitkan. Secara garis besar neo historisme merupakan metode penelitian tentang masa lampau baik dengan dokumen historis maupun non historis (karya sastra) antara kajian tertulis maupun tidak tertulis yang sama-sama dianggap penting dan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Konsep neo historisme kemudian dikenal dengan *culture studies* atau kajian budaya (Ujan, 2015: 43). Kajian neo historisme yang telah dijelaskan,

kemudian diadopsi dalam karya tulis ini dengan menyebutkan historisme. *Best practice* dari adanya kajian historisme dalam karya tulis adalah upaya memahami historisitas dari perempuan Indonesia dalam upaya penyadaran dan peningkatan akan pentingnya peran perempuan di Indonesia.

Tidak hanya selesai pada gagasan filsafat, Historisme juga diwujudkan dalam bentuk upaya konkret peningkatan kesetaraan gender yakni dengan penerapan prinsip *History*, Sinergi pelaku dan program pembangunan, dan Mengatasi kebutuhan gender praktis dan strategis.

History

Erat kaitannya dengan kehidupan manusia, sejarah tentu menjadi bagian yang penting, sehingga dalam proses dan pelaksanaannya kesadaran sejarah perlu ditumbuhkan. Seperti apa yang dikatakan oleh Soekarno bahwa “bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya”. Berkaca pada perkataan Soekarno, pengalaman sejarah Indonesia yang panjang tentu dapat menjadi salah satu rujukan awal dalam proses gerakan kesetaraan gender. Pemaknaan kesadaran sejarah bangsa Indonesia yang memiliki pola serta dinamika pergerakan feminism baik pada masa Kuna, masa Kolonial, maupun Kontemporer akan semakin memperkuat landasan ideologi gerakan feminism ke depannya. Pengilhaman kesadaran sejarah feminism di Indonesia secara menyeluruh akan semakin mempercepat kesadaran budaya nasional Indonesia, yang dalam kaitannya tentu akan mengubah *mindset* nasional sehingga terciptanya kesetaraan gender seperti yang diinginkan.

Sinergi Pelaku dan Program Pembangunan

Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Dian Kartikasari menyebutkan bahwa peran perempuan tidak boleh dianggap kecil, melainkan memiliki setengah hak akan kedudukan yang sama dengan laki-laki (Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, 2018). Dalam rangka menyukseskan

pembangunan berkelanjutan 2030 (*Sustainable Development Goals*) pencapaian kesetaraan gender dalam hal in pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan perlu di persiapkan bersama. Guna meningkatkan kesetaraan gender dalam upaya menyongsong SDG's maka perlu adanya sinergi subyek negara baik pemerintah, akademisi, maupun masyarakat.

a. Pemerintah

Menindaklanjuti pengarusutamaan gender secara terpadu terkoordinasi, pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000. Upaya pengarusutamaan gender (PUG) ini merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari keterkaitannya pemerintah pusat dengan daerah. Strategi PUG diperlukan untuk memastikan semua masyarakat Indonesia baik laki-laki, perempuan, dari semua kelompok usia, wilayah, maupun berkebutuhan khusus dapat terlibat dalam proses pembangunan berkelanjutan. Strategi PUG dilaksanakan dengan cara memastikan adanya akses, partisipasi, kontrol, manfaat yang adil dan setara bagi laki-laki maupun perempuan (Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, 2018).

Disepakatinya komitmen global “Planet 50:50”, Presiden RI Joko Widodo juga berperan sebagai duta “*HeForShe*”. Gerakan *HeForShe* lahir sebagai bentuk langkah nyata untuk meningkatkan solidaritas laki-laki sebagai agen perubahan untuk mencapai kesetaraan gender dan hak perempuan. Misi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam pembangunan serta melindungi perempuan, anak-anak, dan kelompok marginal, dapat dilakukan dengan, 1) Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan; 2) Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI); 3) Penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak (Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, 2018).

b. Masyarakat

Sebagai elemen terbesar dari sebuah negara, partisipasi masyarakat tentu sangat menentukan ke arah mana negaranya akan berjalan. Sebagai garda terdepan negara, partisipasi masyarakat dalam program

kesetaraan dapat dilakukan dengan cara 1) Mendukung penuh kebijakan pemerintah; 2) Memastikan partisipasi penuh di bidang kesetaraan dengan langkah kecil yakni pemberdayaan perempuan baik dalam lingkup kelompok maupun kelompok Desa; 3) Menanamkan sikap disiplin dan pola pikir positif bahwa perempuan mampu menjadi pendukung program kesejahteraan dan pembangunan nasional.

c. Akademisi

Sebagai pionir pendidikan di Indonesia, kalangan akademisi juga diharapkan mampu turut memegang kendali dalam program tujuan pembangunan nasional termasuk SDG's secara merata dan adil. Ilmu pengetahuan, nilai, norma, dan ideologi dalam pembentukan karakter bangsa yang dimiliki seorang akademisi harapannya mampu menunjang nilai kesetaraan dan keadilan gender. Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam pengembangan riset, proses belajar mengajar, dan pengabdian masyarakat juga menjadi sarana untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang menjadi rujukan fenomena sosial dan kebudayaan serta tentunya mencetak lulusan yang memiliki sikap dan perilaku pemahaman tentang kesetaraan gender yang lengkap, sehingga akan tertanam konsep kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya Mengatasi Kebutuhan Gender secara Praktis dan Strategis

Kebutuhan gender secara praktis dan strategis dapat diperoleh dengan beberapa langkah, yakni 1) Pelatihan ketrampilan baik secara akademis maupun non akademis; 2) Membuka luas lapangan pekerjaan bagi perempuan; 3) Penanaman upaya kesadaran sejarah dan feminism dalam suatu kelompok desa; 4) Sosialisasi gerakan *heforshe*. Kebutuhan praktis gender ditujukan sebagai upaya seseorang agar terlibat langsung dan menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan peran gender, sedangkan kebutuhan strategis akan meningkatkan dalam upaya berkesinambungan antara peran antar gender. Dengan kebutuhan gender yang adil dan seimbang, maka pencapaian kesetaraan akan tercapai.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan filsafat historisme dalam kajian teks sejarah adalah hal yang tepat untuk menemukan kembali semangat ideologi feminism di Indonesia. Kesadaran sejarah yang muncul juga akan memperkuat karakter bangsa dan mengarahkan pada upaya-upaya yang dianggap perlu dalam peningkatan kesetaraan gender. Tidak cukup hanya sebuah gagasan filsafat, penamaan historisme juga diwujudkan dalam sebuah aksi nyata dalam upaya kesetaraan gender di Indonesia, yakni *History*, Sinergi Pelaku Program Pembangunan, dan Mengatasi Kebutuhan Gender secara Praktis dan Strategis. Perancangan akronim historisme ini harapannya mampu membawa pada kesetaraan gender dengan kondisi seadil-adilnya, di mana bukan hanya persoalan perempuan dan laki-laki, namun kesetaraan bagi semua kalangan. Langkah-langkah nyata perwujudan akronim historisme pada unit terkecil akan semakin mempercepat kedewasaan Indonesia dalam menghadapi bonus demografi. Prediksi Badan Pusat Statistik mengenai kelimpahan usia produktif Indonesia di tahun 2030, tentu akan menjadi angin segar bagi Indonesia dan membawanya dekat dalam pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* serta kesejahteraan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amar, Syahrul. 2017. "Perjuangan Gender dalam Kajian Sejarah Wanita Indonesia Abad XIX". *Jurnal Fajar Historia*. Volume 1 Nomor 2, Desember 2017, hal. 105-119.
- Arivia, Gadis dan Nur Imam Subono. th. "Seratus Tahun Feminisme di Indonesia: Analisis Para Aktor, Debat, dan Strategi". Friedrich Ebert Stiftung.
- BPS RI. 2019. "Susenas, 2009-2019". Diakses dari: <https://www.bps.go.id/statictable/2012/04/23/1612/persentase-penduduk-berumur-10-tahun-ke-atas-menurut-tipe-daerah-jenis-kelamin-dan-status-pendidikan-2009-2019.html>.

- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Falikhah, Nur. 2018. "Bonus Demografi: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia". Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik. 2019. "Profil Perempuan Indonesia 2019". Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. ISSN: 2089-3515.
- Kementerian Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2018. "Kesetaraan Gender: Perlu Sinergi Antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat". Diakses dari <https://kemenppa.go.id>.
- Laili, Nurul. 2015. "Kajian Historisme dalam Novel *Keindahan dan Kesedihan* Karya Yasunari Kawabata", *Laporan D3 UNIPDU*. Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum.
- Mukri, Syarifah Gustiawati. 2018. "Menyongsong Bonus Demografi Indonesia". *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*. Volume 2 Nomor 6a, hal. 51-52. ISSN: 2338 4638.
- Purwanta. 2011. "Historisme dan Neo Historisme". *Historia Vitae: Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah*. SPPS Vol. 25 No. 1 April 2011.
- Saraswati, Ufi. 2016. Kuasa Perempuan dalam Sejarah Indonesia Kuna", *Sejarah dan Budaya*, Vol. 10 No. 1, Juni 2016, hal. 105-113.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ujan, Andreas J. Ata. 2015. "Ketimpangan Historisme Karl Marx: Kritik Propper terhadap Historisme Karl Marx". *Skripsi*. Universitas Indonesia.